

ABSTRAK

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) berperan untuk menjalankan diplomasi parlemen untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia. BKSAP berperan aktif dalam forum antar parlemen, baik ditingkat regional maupun multilateral. Di tingkat regional, BKSAP DPR RI turut berperan dan terlibat aktif dalam forum kerja sama regional, khususnya melalui partisipasinya dalam *ASEAN Inter Parliamentary Assembly* (AIPA). Melalui partisipasinya di AIPA, BKSAP turut memperhatikan berbagai tantangan dan isu strategis yang mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara, salah satunya terkait konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk membahas bagaimana diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP DPR RI melalui AIPA dalam membantu menyelesaikan konflik di Myanmar. Penelitian ini menggunakan dua konsep, yaitu diplomasi parlemen dan diplomasi multi-track, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan BKSAP DPR RI, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi dokumen dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya. Diplomasi parlemen BKSAP DPR RI dilakukan melalui dialog dan kerjasama antar parlemen, untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar BKSAP mengajukan resolusi dalam Sidang Umum AIPA, agar konflik tersebut dapat dibahas dan mendapat perhatian dari parlemen ASEAN. BKSAP DPR RI terus berupaya untuk menyuarakan konflik yang terjadi Myanmar, yang bertujuan untuk membantu Myanmar dalam memulihkan perdamaian dan stabilitasnya. BKSAP DPR RI melakukan berbagai strategi agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan. Temuan penelitian ini adalah BKSAP DPR RI melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu dengan mengusulkan resolusi terkait perdamaian Myanmar di setiap Sidang Umum AIPA. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa diplomasi parlemen yang dijalankan oleh BKSAP DPR RI mengalami hambatan dan tantangan karena prinsip non-intervensi yang diterapkan oleh ASEAN, sehingga mempersulit negara ASEAN untuk membantu Myanmar di dalam upaya penyelesaian kasus tersebut.

Kata Kunci: Diplomasi Parlemen, BKSAP DPR RI, AIPA, Etnis Rohingya, Konflik di Myanmar.

ABSTRACT

Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) has a role in conducting parliamentary diplomacy to achieve Indonesia's national interests. BKSAP actively participates in inter-parliamentary forums, both at the regional and multilateral levels. At the regional level, BKSAP DPR RI plays an active role in regional cooperation forums, especially through its participation in the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Through its participation in AIPA, BKSAP also pays attention to various challenges and strategic issues that threaten the stability of the Southeast Asian region, one of which is the Rohingya ethnic conflict in Myanmar. Therefore, this research focuses on discussing how the parliamentary diplomacy conducted by BKSAP DPR RI through AIPA to resolve the conflict in Myanmar. This research employs two concepts, namely parliamentary diplomacy and multi-track diplomacy, and uses a descriptive qualitative method with two sources of data: primary and secondary. Primary data was obtained through interviews with BKSAP DPR RI, while secondary data was obtained through document studies and previous research. BKSAP DPR RI's parliamentary diplomacy is conducted through dialogue and inter-parliamentary cooperation, aiming for long-term peace in Myanmar. BKSAP proposes resolutions in the AIPA General Assembly to ensure that the conflict is discussed and gains attention from ASEAN parliaments. BKSAP DPR RI continues to advocate for the conflict in Myanmar, which aims to assist Myanmar in restoring peace and stability. BKSAP DPR RI employs various strategies to resolve the conflict in Myanmar promptly. The findings of this research indicate that BKSAP DPR RI undertakes several approaches to resolve the conflict, such as proposing resolutions related to peace in Myanmar at every AIPA General Assembly. This research reveals that the parliamentary diplomacy carried out by BKSAP DPR RI faces obstacles and challenges due to the non-intervention principle adopted by ASEAN, which complicates the efforts of ASEAN countries to assist Myanmar in resolving the issue.

Keywords: *Parliamentary Diplomacy, BKSAP DPR RI, AIPA, Rohingya Ethnic Group, Conflict in Myanmar.*